

MANAJEMEN PEMBIAYAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SMP NEGERI 4 BIREM BAYEUN DI KABUPATEN ACEH TIMUR

Chairinda¹, Cut Zahri Harun², Nasir Usman³

¹Magister Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

^{2,3} Prodi Magister Administrasi Pendidikan Universitas Syiah Kuala, Darussalam,

Banda Aceh 23111, Indonesia

email: chairindaai@gmail.com

Abstract: *the competence of the supervision of the head of the school is among the factors that influenced the increase in the professionalism of teachers. This research aims to describe: (1) the competence of the head of school in drawing up the programme of academic supervision to enhance the professionalism of teachers, (2) the principal kompetensi in implementing the program for academic supervision to enhance the professionalism of teachers, and (3) the competence of the head of school in following up on the results of academic supervision to enhance the professionalism of teachers. This research uses descriptive qualitative approach method. Data collection techniques used through observation, interviews, and documentation study. The subject of research is the principal, vice principal, teachers, and school superintendent. The results showed that: (1) the head of the SMA Negeri I Kuala Batee Southwest Aceh District have demonstrated a good supervision of competence, in particular in drawing up a program of academic supervision against the teacher. It can be seen from the supervision of the program has been compiled with set goals, objectives and implementation procedures of supervision, but less cooperation with the school superintendent. (2) the head of the SMA Negeri I Kuala Batee Southwest Aceh District have demonstrated a good supervision of competence, in particular in implementing the programme of academic supervision. It can be seen from the application of the models, approaches, and techniques of supervision that are run, but in the application of the techniques of observation has not been fitted with observation guidelines and (3) the competence of the supervision of the head of the SMA Negeri I Kuala Batee Southwest Aceh district in particular in follow-up on the results of supervision is still lacking. This can be from the follow-up results of supervision is performed by evaluating and providing feedback through individual talks with teachers who are disupervisi, but the principal did not devise an action plan next supervision.*

Keywords: *Supervision, Competence, and professionalism of School Head Teachers*

Abstrak: *Pembiayaan pendidikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 4 Birem Bayeun dilaksanakan melalui implementasi fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan, penggunaan, pengawasan, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat penggunaan biaya BOS pada SMP Negeri 4 Birem Bayeun di Kabupaten Aceh Timur. Pendekatan penelitian metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi serta teknik analisis data yang digunakan meliputi kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Subjek penelitian Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, guru, Komite Sekolah, Pengawas dan Konsultan dana BOS Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Perencanaan program dilakukan berdasarkan petunjuk teknis penggunaan dana BOS dengan melibatkan guru, Komite Sekolah, dan Dinas Pendidikan serta melakukan sosialisasi kepada warga sekolah, orang tua serta masyarakat tentang program yang telah direncanakan, (2) Penggunaan dana BOS dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dan program yang telah direncanakan, (3) Pengawasan penggunaan dana BOS dilakukan oleh Komite Sekolah, dan Dinas Pendidikan. Pengawasan dilakukan dengan membandingkan antara program yang direncanakan dengan pelaksanaan., dan (4) faktor-faktor kekuatan penggunaan dana BOS adalah upaya mewujudkan visi dan misi, kepemimpinan kepala sekolah yang kooperatif, tingkat pendidikan guru yang memadai, dukungan masyarakat akan kemajuan pendidikan, transparansi penggunaan dana BOS dan keinginan personil sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah. Sedangkan faktor-faktor penghambat adalah kurangnya jumlah operator pendataan, anggaran yang diterima belum memenuhi semua kebutuhan sekolah, dan adanya pos-pos pembiayaan yang tidak tercantum dalam petunjuk teknis penggunaan dana BOS serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam dukungan dana.*

Kata kunci: *Manajemen, Pembiayaan, dan Bantuan Operasional Sekolah*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Bab II pasal 3 menjelaskan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan membentuk serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab.

Untuk mewujudkan fungsi pendidikan nasional tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar tanpa memungut biaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 49 ayat (1) menetapkan bahwa: "Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)".

Bentuk kebijakan pemerintah Indonesia untuk memberikan mensukseskan wajib belajar 9 tahun adalah menyalurkan berbagai bantuan demi keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS merupakan dana bantuan

pemerintah di bidang pendidikan yang diperuntukkan bagi setiap sekolah tingkat dasar dan menengah pertama di Indonesia, seperti yang ditetapkan oleh Depdiknas (2006:29), yaitu:

Pada tatanan manajemen pembiayaan pendidikan, secara konsep program BOS diberikan untuk mengurangi beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, membebaskan pungutan bagi seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta, meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Kebijakan Pemerintah dalam pemberian BOS untuk meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan dasar dan menengah. Bantuan dana BOS kepada sekolah-sekolah, diharapkan dapat dikelola dengan profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51/2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2012.

Sekolah dapat memanfaatkan dana BOS dengan berpedoman pada juklak program dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun oleh kepala sekolah, guru dan komite sekolah sebagai perwakilan masyarakat yang telah diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 8, yang menyebutkan bahwa: "Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan" serta pasal 9 yang berbunyi: "Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber

daya dalam penyelenggaraan pendidikan”.

SMP Negeri 4 Birem Bayeun telah menerima dana BOS untuk menjalankan operasional sekolahnya. Pengelolaan dana BOS pada tingkat sekolah selama ini cenderung tertutup, di mana sekolah tidak mengumumkan APBS (Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah) pada papan pengumuman. Tentunya keterbukaan dan akuntabilitas manajemen pembiayaan dana BOS di SMP Negeri 4 Birem Bayeun pada publik sangat diperlukan guna mensukseskan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Konsep Manajemen Pendidikan

Handoko (2009:8) mengatakan: “Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasi pengarah dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya, sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”.

Sehubungan dengan manajemen pendidikan, Engkoswara dan Aan Komariah (2011:89) mendefinisikan bahwa: “Manajemen pendidikan upaya seseorang untuk mengerahkan dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif, dan menerima pertanggungjawaban pribadi untuk mencapai pengukuran hasil yang ditetapkan”. Dengan demikian, manajemen pendidikan lebih ditekankan pada upaya seseorang pemimpin menggerakkan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan.

Siagian (2007:26) menyatakan secara lebih sederhana mengenai fungsi-fungsi dalam

manajemen: “Fungsi-fungsi dalam manajemen mencakup perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakkan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) sebagai suatu proses untuk menjadikan visi menjadi aksi”.

Konsep Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Manajemen biaya pendidikan berkenaan dengan persoalan dari mana sumber dana dan bagaimana mengalokasikannya. Fattah (2006:27) mengatakan: "Manajemen pembiayaan merupakan tindakan pengurusan biaya yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan”.

Manajemen pembiayaan memiliki tiga tahapan penting yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap penilaian (evaluasi), ketiga tahapan tadi apabila diterapkan dalam manajemen keuangan menjadi tahap perencanaan keuangan (*budgeting*) dan tahap pelaksanaan (*accounting*) dan tahap penilaian atau auditing (Fattah, 2012:1).

Pengelolaan pembiayaan pendidikan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan (PP No 48 Tahun 2008 pasal 59) antara lain:

- (a) Prinsip keadilan. Prinsip keadilan dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial ekonomi, (b) Prinsip efisiensi. Prinsip ekonomi dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan, (c) Prinsip transparansi. Prinsip transparansi dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga dapat diaudit atas

dasar standar audit yang berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian, dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan serta (d) Prinsip akuntabilitas publik. Prinsip akuntabilitas publik dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Transparan berarti ada keterbukaan dalam mengelola dana BOS, Fattah (2006:38) mengatakan:

Transparansi biaya pendidikan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Sedangkan akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya (Fattah, 2006:40). Fattah (2006:41) mengatakan bahwa: Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu:

- (1) Adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah,
- (2) Adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya,
- (3) Adanya partisipasi untuk saling

menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat

Jenis-jenis Pembiayaan Pendidikan

Dadang, dkk (2014:23) mengatakan bahwa: "Jenis-jenis biaya pendidikan dapat dikategorikan ke dalam: (a) biaya langsung (*direct cost*), (b) Biaya tidak langsung (*indirect cost*), (c) *Private cost*, (d) *Social cost* dan (e) *Monetary cost*". Berikut Dadang, dkk (2014:23-25) memberikan penjelasan tentang jenis-jenis biaya pendidikan tersebut.

a) Biaya langsung (*direct cost*)

Biaya pendidikan langsung (*direct cost*) merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan yang dikeluarkan oleh sekolah, siswa dan atau keluarga sekolah. Biaya langsung, berwujud dalam bentuk pengeluaran uang yang secara langsung digunakan untuk membiayai penyelenggaraan PBM, seperti: (1) biaya tambahan untuk ruangan, perlengkapan belajar, alat peraga, bahan laboratorium, pakaian praktik, (2) biaya transportasi/angkutan sekolah, (3) biaya buku pegangan guru dan buku di perpustakaan, (4) biaya UKS dan biaya penyelenggaraan *counseling*, dan (5) biaya mendatangkan guru tambahan/ narasumber.

b) Biaya tidak langsung (*indirect cost*)

Biaya tidak langsung (*indirect cost*), berbentuk biaya hidup yang dikeluarkan oleh keluarga atau anak yang belajar untuk keperluan sekolah, biaya ini dikeluarkan tidak langsung digunakan oleh lembaga pendidikan, melainkan dikeluarkan oleh keluarga anak atau yang menanggung biaya peserta didik yang mengikuti

pendidikan.

c) *Private cost*

Private cost merupakan keluruhan biaya yang dikeluarkan keluarga, atau segala biaya yang harus ditanggung dan dikeluarkan oleh keluarga anak untuk keberhasilan belajar anaknya. Misalnya keluarga membayar guru les private.

d) *Social cost*

Social cost merupakan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat, baik perorangan maupun terorganisasi untuk membiayai segala keperluan belajar. Biaya ini yang dikeluarkan masyarakat sebagai wujud partisipasinya.

e) *Monetary cost*

Monetary cost. Biaya yang harus dikeluarkan dalam bentuk seperti jasa, tenaga dan waktu, biaya semacam ini dapat diuangkan atau dinilai dan disetarakan kepada/ dengan nilai uang. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan semacam ini disebut biaya moneter.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Depdiknas (2006:3) menetapkan tujuan pemberian dana BOS sebagai berikut:

Program bantuan operasional sekolah (BOS) bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan iuran siswa, namun sekolah yang dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat dibolehkan melakukan pungutan sejenis iuran siswa lainnya dengan ketentuan tidak lebih besar dari pada jumlah nominal

standar dana BOS per individu siswa jenjang pendidikan dasar.

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT, termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKB Mandiri) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta diseluruh provinsi di Indonesia. Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:

1. SD/SDLB : Rp 580.000,-/siswa/tahun
2. SMP/SMPLB/SMPT/SATAP : Rp 710.000, /siswa/tahun.

Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari- Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Pengelolaan BOS melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun dalam pengawasannya (Depdiknas, 2012:4).

Faktor Pendukung dan Penghambat Dana BOS

Dalam perencanaan dan pelaksanaan dana BOS, analisis pendukung dan penghambat dilaksanakan sebagai bagian dari perencanaan strategis. Faktor pendukung yang dimaksud adalah adanya rencana stratejik yang harus dilaksanakan sebagai bagian dan rencana stratejik organisasi, dan organisasi dengan seluruh potensi yang dimilikinya, dianggap dapat merealisinya. Sedangkan faktor penghambat merupakan berbagai analisis faktor yang menjadikan pelaksanaan dana BOS terkendala oleh berbagai situasi nyata di sekolah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode dekriptif. Sugiyono (2012:228) mengatakan: "Penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan".

Dengan demikian, untuk memperoleh data secara kualitatif dan valid, maka data diperoleh dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, observasi, dan dari catatan lapangan serta didukung data dokumentasi berupa foto lokasi penelitian, foto RKAS BOS baik foto perencanaan anggaran maupun LPJ dana BOS. Adapun subjek penelitian yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, bendahara, operator sekolah, ketua Komite, pengawas dan Konsultan dana BOS dari Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur.

Lokasi penelitian di SMP Negeri 4 Birem Bayeun, yang berada dalam Kabupaten Aceh Timur. Penelitian dilaksanakan dari tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014.

Setelah mendapatkan data, kemudian dianalisis secara triangulasi dan kontinyu untuk menemukan data yang valid dan terkait dengan manajemen pembiayaan pendidikan, dengan mengikuti proses analisis data pada pendapat Miles dan Huberman (Emzir, 2011:129) yang meliputi kegiatan (1) Reduksi Data, (2) Penyajian data, dan (3) Penarikan/Verifikasi Kesimpulan".

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara, untuk penyusunan anggaran dana BOS, sekolah mengikutsertakan berbagai pihak dengan tujuan anggaran yang disusun betul-betul dapat berdaya guna dan efisien, seperti yang dikemukakan kepala sekolah:

Sekolah dalam menyusun anggaran dana BOS melibatkan berbagai komponen, baik kepala sekolah, wakil, bendahara, komite sekolah yang mewakili orang tua siswa maupun guru, bahkan pihak dinas pendidikan yang membawahi pengawasan dana BOS juga diikutsertakan. Ini dilakukan agar dalam membuat draft anggaran sekolah mendapat berbagai masukan dan arahan dari dinas pendidikan. Dalam rapat penyusunan anggaran mereka mengusulkan berbagai kebutuhan sesuai dengan bidang masing-masing. Namun tentu saja program yang mereka usul dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kebutuhan mendesak dan triwulan. Berdasarkan informasi di atas perencanaan

dan pengelolaan dana BOS melibatkan seluruh personil sekolah sehingga diperoleh data yang akurat dan lengkap.

Penggunaan dana BOS di SMP Negeri 4 Birem Bayeun, melalui beberapa tahapan, antara lain (a) proses awal sebagai proses pendataan, (b) mekanisme proses penyaluran dana BOS, (c) penyaluran dana BOS, (d) Pengambilan dana BOS, (e) penggunaan dana BOS, dan (f) mekanisme pelaksanaan penggunaan anggaran BOS.

Dalam hal pengawasan penggunaan dana BOS di SMP Negeri 4 Birem Bayeun, Kepala

sekolah memberikan komentar dalam wawancara berikut.

Untuk pengawasan dilakukan oleh orang tua siswa dan masyarakat yang diwakili oleh Komite Sekolah, dari dinas pendidikan sendiri karena dalam merencanakan kegiatan penganggaran sekolah atau istilahnya dalam penyusunan RAPBS komite sekolah dan dinas juga ikut serta. Jadi dalam penggunaan dana pendidikan kami tidak bisa sembarangan atau main-main. Untuk itu saya selalu berkoordinasi dan melakukan observasi langsung untuk mengetahui sejauh mana proses pelaksanaan, hambatan saat pelaksanaan serta bagaimana solusi yang diambil.

Komentar komite sekolah tentang pengawasan dana BOS, seperti berikut:

Saya sebagai komite sekolah yang mewakili aspirasi orang tua siswa dan masyarakat, tentunya harus mengetahui bentuk tindakan pelaksanaan program dana BOS yang telah dilakukan. Untuk itu, saya selain berkoordinasi dengan kepala sekolah, juga melihat langsung bahkan mengadakan tanya jawab dengan guru dan orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan program. Hal ini saya lakukan agar saya dapat mengetahui apakah ada kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program di lapangan. Ini saya lakukan agar dana BOS betul-betul sesuai dengan juknis serta dapat berdaya guna bagi peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri 4 Birem Bayeun.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, program yang menjadi evaluasi adalah memeriksa kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan. Jika diperoleh temuan tentang kendala dalam pelaksanaan program, maka akan diberikan arahan dan bimbingan dalam rapat.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor pendukung dalam menggunakan dana BOS

adalah kekuatan yang dimiliki sekolah, seperti adanya visi dan misi serta faktor kepemimpinan kepala sekolah, seperti yang dikemukakan oleh guru seperti berikut:

Kepemimpinan kepala sekolah saya rasa menjadi faktor pendukung yang sangat kuat, karena selama ini kepala sekolah secara terbuka selalu menjelaskan kepada kami berapa biaya BOS yang diterima, kemana menggunakannya. Bahkan dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan kepala sekolah selalu melibatkan guru.

Sedangkan faktor penghambat penggunaan dana BOS di SMP Negeri 4 Birem Bayeun berdasarkan hasil wawancara adalah kurangnya tenaga operator data, seperti hasil wawancara dengan operator berikut:

Disamping tugas pokok mengajar, saya juga harus mengurus lalu lintas dokumen BOS dari sekolah ke kabupaten dan sebaliknya. Bahkan tidak jarang saya harus mengantar sendiri dokumen-dokumen tersebut ke Dinas. Namun demikian saya tidak keberatan dengan tugas tambahan yang diberikan. Untuk mengatur jadwal pengerjaan data, saya membagi waktu untuk mengajar dan mengerjakan tugas tambahan, di atas jam 13.00. Jadi tidak mengganggu jam mengajar sama sekali, lagipula kesibukan itu hanya terjadi setiap tiga bulan sekali ketika sekolah akan menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Hambatan lain adalah ada beberapa pos biaya yang tidak terdapat dalam dana BOS, seperti konfirmasi wakil kepala sekolah bagian kurikulum yang mengatakan:

Semenjak adanya dana BOS, ada beberapa pos insentif yang hilang seperti tunjangan uang transport, insentif sebagai wali kelas, dan lain-lain, yang selama ini dibiayai dengan dana partisipasi masyarakat. Sementara itu dalam ketentuan penggunaannya, dana BOS tidak boleh

digunakan untuk memberikan insentif bulanan semacam ini.

Selain itu, kesalahpahaman orang tua yang menganggap bahwa dengan adanya dana BOS, semua biaya diserahkan ke sekolah. Hal ini dikemukakan oleh pengawas dalam suatu wawancara berikut:

Harus saya akui, dengan jumlah dana BOS yang diterima sebanyak 141 siswa, tentu saja sekolah kewalahan dalam melaksanakan program secara 100%, apalagi anggapan orang tua siswa yang beranggapan bahwa dengan adanya dana BOS maka orang tua tidak lagi mengeluarkan biaya apapun untuk pendidikan anaknya.

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai faktor penghambat tersebut adalah sekolah berkonsultasi dengan tim manajemen BOS Kabupaten maupun musyawarah dengan pihak internal sekolah, komite sekolah dan orang tua murid. Dengan hasil musyawarah untuk mengatasi hambatan adanya keterlambatan penyaluran dana BOS, sekolah memiliki kebijaksanaan dengan menggunakan dana talangan dari sumber dana lain yang belum segera dimanfaatkan. Sumber dana lain tersebut yaitu dana dari Pemerintah Pusat, dana dari Pemerintah Daerah, dana SSN, maupun sumbangan sukarela dari orang tua murid dan masyarakat.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian berupa hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan catatan lapangan diperoleh keterangan bahwa perencanaan penggunaan dana BOS dilakukan dengan: (a) perencanaan disusun berdasarkan

visi dan misi sekolah, (b) adanya analisis SWOT, dan (c) kepala sekolah melibatkan guru, komite sekolah dan masyarakat serta dinas pendidikan bagian perencanaan dalam perencanaan program. Hal ini sesuai dengan pendapat Murniati (2008:51) yang mengatakan:

Dengan pemberdayaan personal, sekolah akan berkemampuan melakukan berbagai tugas seefektif mungkin dengan adanya kepercayaan yang diberikan oleh manajer puncak. Pemberdayaan merupakan alat atau sarana untuk menumbuh kembangkan potensi personal dalam organisasi sekolah, sehingga organisasi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat

Selanjutnya dalam proses perencanaan yang dilakukan, dimulai dengan menetapkan sasaran dan tujuan program selanjutnya, penetapan pihak yang dilibatkan, perhitungan anggaran, alokasi waktu, serta bagaimana pelaksanaan. Langkah-langkah penyusunan anggaran BOS ini sesuai dengan pendapat Muhaimin, dkk (2010: 359), yaitu:

- a) Menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan
- b) Menyusun rencana berdasarkan skala prioritas pelaksanaannya
- c) Menentukan program kerja dan rincian program
- d) Menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program
- e) Menghitung dana yang dibutuhkan
- f) Menentukan sumber dana untuk membiayai rencana

SMP Negeri 4 Birem Bayeun dalam menggunakan dana BOS secara transparan dan akuntabilitas, dengan cara secara terus menerus mensosialisasikan pelaksanaan program BOS.

Transparansi penggunaan dana BOS berkaitan dengan kemauan sekolah untuk dapat lebih terbuka dan tidak menerapkan sistem tertutup dalam berbagai hal, terutama dalam mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan yang diperoleh dari masyarakat, terutama masyarakat pengguna jasa kependidikannya. Tindakan yang dilakukan oleh sekolah sesuai dengan amanat Depdiknas (2012:4) yang menjelaskan bahwa:

Dalam implementasi MBS di sekolah, pengelolaan dana BOS menggunakan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang mana pelaporan dana BOS harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah dan masyarakat. Selain itu, pengelolaan BOS melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun dalam pengawasannya

Pengawasan dana BOS di SMP Negeri 4 Birem Bayeun dilakukan dengan memeriksa kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan. Jika diperoleh temuan tentang kendala dalam pelaksanaan program, maka akan diberikan arahan dan bimbingan dalam rapat. Pengawasan internal dilakukan oleh kepala sekolah, dan dari pihak luar dilakukan oleh komite sekolah dan dinas pendidikan kabupaten bagian penanganan dana BOS. Hal ini sesuai dengan pendapat Koswara (2010:12) yang mengatakan:

Pengawasan dilakukan untuk mencegah penyimpangan keuangan dan mengoreksi kesalahan pencatatan yang mungkin terjadi. Pengawasan dapat secara internal dan eksternal, dapat pula dilakukan secara struktural maupun fungsional yang mencakup pemeriksaan, pembinaan dan evaluasi. Sedangkan pengendalian cenderung dilakukan oleh pimpinan atau

atasan langsung, sebagai upaya korektif dan antisipatif terhadap pelaksanaan tugas pengelola.

Faktor-faktor pendukung penggunaan dana BOS di SMP Negeri 4 Birem Bayeun berdasarkan hasil penelitian adalah adanya visi dan misi, kepemimpinan kepala sekolah, tingkat pendidikan guru, dukungan masyarakat, transparansi dana BOS dan keinginan personil sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah. Sedangkan faktor-faktor penghambat penggunaan dana BOS di SMP Negeri 4 Birem Bayeun adalah kurangnya jumlah operator pendataan, anggapan orang tua siswa bahwa dengan adanya dana BOS maka semua biaya digratiskan, anggaran yang diterima belum mampu memenuhi semua kebutuhan sekolah, dan adanya pos-pos pembiayaan yang hilang akibat tidak terdapat dalam juknis penggunaan dana BOS. Mengatasi berbagai hambatan di atas, kemampuan kepala sekolah sangat dominan, seperti yang dikemukakan oleh Mulyasa (2007:32) yaitu:

Kunci keberhasilan suatu sekolah pada hakekatnya terletak pada efisiensi dan efektifitas penampilan seorang kepala sekolah sebagai kriteria keberhasilan sekolah diperlukan adanya kepemimpinan kepala yang berkualitas. Empat kriteria penilaian kinerja kepala sekolah, meliputi: (1) Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab; (2) Kemampuan dan keterampilan; (3) Semangat yang tinggi; (4) Berinisiatif dan berkemampuan tinggi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Perencanaan penggunaan dana BOS di SMP Negeri 4 Birem Bayeun dilakukan dengan

cara (1) kepala sekolah melibatkan guru, komite sekolah, dan dinas pendidikan dalam proses perumusan program, (2) proses perumusan program dimulai dengan menetapkan sasaran dan tujuan program selanjutnya, penetapan pihak yang dilibatkan, perhitungan anggaran, alokasi waktu, serta bagaimana pelaksanaan, dan (3) melakukan sosialisasi kepada warga sekolah, orang tua dan masyarakat tentang program yang telah direncanakan.

2. Kepala sekolah memberdayakan personil sekolah dalam penggunaan dana BOS, dengan memberikan arahan meliputi cara kerja dan pembagian tugas kerja. Selain itu pemberian tugas yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan, tanggung jawab dan loyalitas guru. Penggunaan dana BOS disesuaikan dengan program yang telah direncanakan yang berpedoman pada juknis penggunaan dana BOS
3. Pengawasan dilakukan oleh komite sekolah, dan dinas pendidikan. Pengawasan dilakukan untuk memeriksa kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan. Jika diperoleh temuan tentang kendala dalam pelaksanaan program, maka akan diberikan arahan dan bimbingan dalam rapat.
4. Faktor-faktor pendukung penggunaan dana BOS di SMP Negeri 4 Birem Bayeun adalah adanya visi dan misi, kepemimpinan kepala sekolah yang kopreatif, tingkat pendidikan guru yang mendukung, dukungan masyarakat, transparansi dana BOS dan keinginan personil sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah.

Sedangkan faktor-faktor penghambat penggunaan dana BOS di SMP Negeri 4 Birem Bayeun adalah kurangnya jumlah operator pendataan, anggaran yang diterima belum mampu memenuhi semua kebutuhan sekolah, kurangnya partisipasi orang tua dalam membantu sekolah karena anggapan orang tua siswa bahwa dengan adanya dana BOS maka semua biaya digratiskan, dan adanya pos-pos pembiayaan yang hilang akibat tidak terdapat dalam juknis penggunaan dana BOS.

Saran-saran

1. Penggunaan dana BOS, kepala sekolah memberdayakan dan memberikan bimbingan pada seluruh personil sekolah. Hal ini sangat baik guna memsukkseskan perencanaan program yang telah disusun. Selain itu, untuk memberikan semangat kerja personil sekolah, kepala sekolah perlu meningkatkan motivasi kerja personil, melalui pemberian penghargaan dan memberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan personil dalam melaksanakan tuganya.
2. Mengadapi kekurangan dana BOS dalam memenuhi berbagai kebutuhan sekolah, kepala sekolah sangat baik meningkatkan kerjasama dengan komite sekolah, hal ini dilakukan karena komite sekolah menjadi mitra sekolah dalam memajukan sekolah dan memfasilitasi berbagai kebutuhan sekolah, menyakinkan masyarakat, bahwa peran masyarakat secara aktif sehingga sekolah akan semakin kondusif dan memudahkan

sekolah dalam pemenuhan kebutuhan sekolah. Disarankan pemenuhan dana sekolah tidak hanya dapat diperoleh dari partisipasi masyarakat, tetapi juga dengan melibatkan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar sekolah.

3. Masih kurangnya tenaga operator, diharapkan sekolah dapat menambah atau mencari tenaga operator yang bukan berasal dari tenaga guru. Hal ini akan dapat menambah percepatan pendataan sekolah serta tidak terganggunya jam mengajar.
4. Transparansi kepada masyarakat mengenai penggunaan dana BOS, selain dilakukan dengan sosialisasi juga dicantumkan pada papan pengumuman, sehingga masyarakat akan tahu rincian program serta anggaran yang digunakan, hal ini untuk mengantisipasi kesalahpahaman masyarakat terhadap sekolah dalam penggunaan dana BOS.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Dadang dan Suhardan. (2014). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Depdiknas. (2006). *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOS dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. (2012). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51/2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2012*. Jakarta: Depdiknas.
- Engkoswara dan Komariah, A. (2011). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Fattah dan Nanang. (2006). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- _____. (2012). *Standar Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Handoko, Hani. T. (2009). *Manajemen*. Edisi 2. Yogyakarta: BPFE.
- Koswara, E. (2010). *Pengelolaan Manajemen Keuangan Sekolah yang Efektif*. [http://koswaraero.blogspot.com/2010/04/pengelolaan manajemen keuangan sekolah.html](http://koswaraero.blogspot.com/2010/04/pengelolaan-manajemen-keuangan-sekolah.html). Diakses tanggal 4 Januari 2013
- Muhaimin. (2010). *Manajemen Pendidikan (Aplikasi dalam Penyusunan Pengembangan Sekolah/Madrasah)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulyasa, E. (2007). *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: Rosda Karya.
- Murniati, A.,R. (2008). *Manajemen Stratejik: Peran Kepala Sekolah dalam Pemberdayaan*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Siagian dan Sondang. (2007). *Fungsi-fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2012). *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung : Alfabeta.
- Syafaruddin. (2005). *Manajemen Pembelajaran*. Jakarta: *Quantum Teaching*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. (2003). *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.